



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan II
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2026**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan II tahun 2026.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI	98	%	98	99.1
[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	95	%	93	90.91
[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	85	Nilai	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	95	%	25	85.06
[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	50	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	95	%	10	56.49
[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	330	Orang	0	0
[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	2	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.92	Nilai	50	63.62

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) April s.d Juni
2. Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026 (9 April 2026)
3. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima (11-12 pril 2026)

Progress/Kegiatan

Berdasarkan pengukuran kinerja triwulan II, dari 182 total responden pada triwulan II sebanyak 179 responden menyatakan puas terhadap layanan LLDIKTI Wilayah XI dan 3 orang responden menyatakan belum puas. Pengukuran tersebut apabila diakumulasi dari triwulan I maka total responden sebanyak 442 responden dan yang menyatakan puas sebanyak 438 responden dengan capaian sebesar 99,10%.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara daring pada **Triwulan 2 Tahun 2026** di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI berhasil mengumpulkan penilaian dari total **182 orang responden** yang berasal dari sivitas akademika. Profil dari para responden pada triwulan ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin:

Responden pada periode ini terdiri dari laki-laki sebanyak 109 orang dan perempuan sebanyak 73 orang. Secara umum, partisipasi dari kedua kelompok gender ini sudah terwakili dengan baik untuk memberikan penilaian pelayanan secara berimbang.

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Jenjang):

Mayoritas sivitas akademika yang menggunakan layanan dan mengisi survei pada Triwulan 2 ini merupakan lulusan berpendidikan tinggi. Lulusan S1/DIV menempati jumlah terbanyak yaitu 101 orang, diikuti oleh lulusan S2 sebanyak 51 orang, dan lulusan S3 sebanyak 9 orang. Sisanya adalah lulusan DI/DII/DIII sebanyak 14 orang serta lulusan SMA/Sederajat sebanyak 7 orang. Profil pendidikan yang tinggi ini menandakan bahwa para pengguna layanan memiliki pemahaman digital yang matang dan bersikap kritis dalam menilai setiap unsur aplikasi serta birokrasi layanan.

Pada Triwulan 2 Tahun 2026, LLDIKTI Wilayah XI mencatatkan performa indeks keseluruhan yang sangat memuaskan, di mana Nilai IKM Unit Pelayanan berhasil mencapai angka 90.53 yang menempatkan mutu pelayanan kita pada kategori A (Sangat Baik). Keberhasilan ini juga dipertegas oleh pencapaian Nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 98.35%, di mana dari total 182 responden, sebanyak 179 sivitas akademika menyatakan Puas dan hanya 3 responden yang menyatakan Tidak Puas.

Tiga Aspek Terbaik (Apresiasi Tertinggi daridari Civitas Akademika)

U4 - Kesesuaian Biaya Pelayanan (3.978)	Meraih skor tertinggi hampir sempurna. Sivitas akademika menilai biaya yang dibayarkan sangat sesuai dengan yang diinformasikan (layanan bersih, transparan, dan bebas pungli/Rp0).
U7 - Kemudahan Penggunaan Fitur Aplikasi (3.621)	Sivitas akademika merasa menu dan tombol-tombol di dalam aplikasi layanan sangat mudah digunakan dan tidak membingungkan saat dioperasikan.
U1 & U5 - Kesesuaian Persyaratan & Produk Pelayanan (3.610):	Syarat yang diminta di awal dinilai sama persis dengan informasi yang dipublikasikan (U1), serta hasil dokumen/output digital yang diterima sudah sesuai dengan janji layanan (U5).

Dua Aspek Terendah (Titik Lemah yang Perlu Diperbaiki)

U3 - Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian (3.505)

Menjadi unsur dengan skor terendah pada triwulan ini. Pengguna menilai durasi dari saat berkas diajukan hingga selesai terkadang masih sedikit meleset atau lebih lama dari waktu penyelesaian yang diinformasikan di awal.

U9 - Kualitas Isi/Konten Aplikasi Sistem Layanan (3.544)

Berada di posisi terendah kedua. Ketersediaan informasi pendukung, kejelasan teks instruksi, atau kelengkapan data di dalam aplikasi dinilai masih bisa disempurnakan lagi kualitasnya agar lebih informatif.

Kendala/Permasalahan

Secara keseluruhan, hasil rapor pelayanan daring di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI pada Triwulan 2 Tahun 2026 menunjukkan peningkatan kualitas yang sangat positif dengan indeks total melompat ke angka 90.53 (Predikat Sangat Baik/A). Performa sistem digital kita juga membaik, terlihat dari unsur kecepatan aplikasi (U6) yang naik ke angka 3.566. Meski begitu, demi mempertahankan tren positif ini, ada dua catatan dari hasil Triwulan 2 yang menjadi tantangan ke depan

Catatan pertama adalah mengenai ketepatan waktu pada unsur U3 (nilai 3.505). Walaupun secara aturan nilai ini sudah masuk kategori Baik, angka ini menjadi yang paling rendah pada triwulan ini. Tantangan bagi petugas internal LLDIKTI Wilayah XI adalah mengimbangi sistem layanan daring yang sudah semakin ringkas dengan proses verifikasi internal di *back-office* yang lebih responsif, agar dokumen yang diajukan oleh sivitas akademika tidak mengalami *delay* dan bisa selesai sesuai jangka waktu yang dijanjikan.

Catatan kedua berada pada unsur kualitas konten aplikasi atau U9 (nilai 3.544). Tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh isi, pengumuman, panduan pengisian, hingga format berkas yang ada di dalam aplikasi sistem layanan selalu diperbarui (*up-to-date*) dan mudah dipahami, sehingga sivitas akademika mendapatkan kejelasan informasi penuh saat mengakses sistem.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XI akan menyelenggarakan **Forum Konsultasi Publik (FKP)** pada Triwulan 3. Forum ini akan mempertemukan pengelola layanan dengan perwakilan sivitas akademika secara langsung untuk mendiskusikan bersama hasil survei, menjaring aspirasi tatap muka, serta merumuskan kesepakatan standar waktu pelayanan yang lebih ideal dan realistis bagi kedua belah pihak.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Evaluasi kinerja perguruan tinggi pada AMIK Panca Bhakti, Akademi Perpajakan Panca Bhakti, Akademi Manajemen Perusahaan Panca Bhakti, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas, Universitas PGRI Palangka Raya
2. Pendampingan Akreditasi PTS sesuai dengan usulan dari PTS
3. Evaluasi Lapangan Usul Rekomendasi Pendirian PTS, Perubahan PTS, dan Pembukaan Program Studi sesuai dengan usulan dari Badan Penyelenggara / PTS
4. Pemutakhiran data akreditasi perguruan tinggi triwulan II
5. Penyusunan bahan laporan kinerja triwulan I

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan II sebanyak 140 PTS di Kalimantan telah terakreditasi dari total 154 PTS dengan capaian kinerja sebesar 90,91%. Capaian ini belum memenuhi target kinerja triwulan I dan akhir 2026 dengan tingkat keberhasilan sebesar 97,75% dari target yang ditetapkan pada triwulan II. Sebanyak 14 PTS belum terakreditasi dikarenakan akreditasi yang kedaluwarsa dan PTS yang memang sudah tidak aktif secara operasional namun belum ditutup. Pada triwulan II ini sebanyak 7 PTS telah mengajukan akreditasi ulang, 1 PTS sedang proses penggabungan, dan 6 PTS sedang dalam pembinaan dan kemungkinan besar akan ditutup. Beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan pada triwulan II adalah :

1. Kegiatan Evaluasi kinerja perguruan tinggi di triwulan II telah dilaksanakan pada :

- Akademi Perpajakan Panca Bhakti, tanggal 21 Mei 2026;
- AMIK Panca Bhakti, tanggal 21 Mei 2026;
- AMP Panca Bhakti Pontianak, tanggal 21 Maret 2026;
- Universitas PGRI Palangka Raya, tanggal 3 Juni 2026;
- STIE Kuala Kapuas, tanggal 4 Juni 2026.

2. Pendampingan Akreditasi PTS Triwulan I dilaksanakan pada :

- Politeknik Borneo Citra Medika, tanggal 4 Mei 2026;
- Politeknik Unggulan Kalimantan, tanggal 5 Mei 2026;
- STIE Tabalong, tanggal 25 Mei 2026;
- Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, tanggal 26 Mei 2026;
- STIKES Intan Martapura, tanggal 4 Juni 2026;
- STIE Boedi Oetomo, tanggal 9 Juni 2026;
- STIE Balikpapan, tanggal 10 Juni 2026

3. Pemutakhiran data akreditasi perguruan tinggi triwulan II telah dilaksanakan.

4. Penyusunan bahan laporan kinerja triwulan I telah dilaksanakan.

Kendala/Permasalahan

Berdasarkan identifikasi kami, ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan capaian kinerja terkait Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta, antara lain :

1. **Faktor internal pada PTS :**

- **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada PTS hanya Bersifat "Formalitas"**

Masalahnya: Terdapat beberapa PTS yang memiliki dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) lengkap di atas kertas, namun siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) tidak berjalan.

- **Kualifikasi dan Rasio Dosen yang Tidak Memenuhi Standar**

Masalahnya: PTS kekurangan Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPT) yang memiliki NIDN, atau kualifikasi akademiknya belum memenuhi syarat minimum (banyak yang belum S3 untuk level institut/universitas, atau belum memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli/Lektor).

- **Produktivitas Tri Dharma yang Rendah dan Tidak Terdokumentasi**

Masalahnya: Kegiatan dosen hanya berputar pada pengajaran. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sangat minim, jarang melibatkan mahasiswa, dan anggarannya tidak di standarisasi oleh yayasan/kampus.

- **Lemahnya Tata Kelola Keuangan dan Komitmen Badan Penyelenggara PTS**

Masalahnya: Alokasi dana dari Badan Penyelenggara (Yayasan/Perkumpulan) ke PTS sangat terbatas. Pendapatan kampus yang hanya mengandalkan uang kuliah mahasiswa (UKT) sering kali habis untuk operasional rutin dan gaji, tanpa menyisakan anggaran untuk pengembangan mutu.

2. Faktor Eksternal :

Proses transisi ke SAPTO 2.0 (Sistem Pengelolaan Akreditasi Online) yang diwajibkan oleh BAN-PT sering kali memicu beberapa kendala teknis dan administratif bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sedang mengajukan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT).

Secara umum, berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi PTS saat mengajukan APT ke SAPTO 2.0 :

- Sinkronisasi Data PDDikti yang Lambat

Kendalanya:

SAPTO 2.0 berbasis pada integrasi data digital secara langsung. Sering terjadi penundaan (delay) atau kegagalan sinkronisasi antara data yang sudah diperbarui di PDDikti dengan dasbor SAPTO 2.0. Akibatnya, data kuantitatif institusi di SAPTO terlihat tidak valid atau belum update.

- Masalah Akses Akun SAPTO 2.0

Kendalanya:

Beberapa PTS belum melakukan migrasi akun dari SAPTO ke SAPTO 2.0, sehingga pengajuan akreditasi ulang perguruan tinggi tidak bisa dilakukan atau terlambat.

- Ketidakstabilan Tautan Dokumen dan Ukuran File

Kendalanya:

Dokumen borang (LKPT, LED) yang diunggah ke sistem terkadang mengalami corrupt, tautannya tidak stabil (pecah/ error saat diakses asesor), atau gagal tersubmit dengan sempurna karena traffic server yang tinggi.

- Kesalahan Penggunaan Template Borang Kuantitatif

Kendalanya:

SAPTO 2.0 dirancang memiliki pembaca otomatis berbasis template data kuantitatif. Jika PTS mengubah format kolom, menambah baris secara sembarangan, atau memodifikasi formula bawaan pada file Excel template borang, sistem akan menolak dokumen tersebut secara otomatis.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Optimalisasi program kerja pada tim kerja terkait dalam pemenuhan capaian kinerja IKU 1.2. antara lain :
 - Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada PTS berjalan
 - Memastikan usulan registrasi dosen pada PDDIKTI dan usulan Jabatan Fungsional berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan
 - Memastikan fasilitasi program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjalan sesuai dengan ketentuan
2. Memfasilitasi kendala teknis dan administratif bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sedang mengajukan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan Kegiatan Pendampingan.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyelarasan target rencana strategis dengan IKU terbaru
2. Penetapan target perjanjian kinerja tahun 2026
3. Finalisasi Program Kerja tahun 2026
4. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026
5. Penyusunan pagu angka kasar tahun 2027
6. Penyusunan rencana kerja tahun 2027
7. Penyusunan anggaran pagu indikatif tahun 2027
8. Melaksanakan penyamaan persepsi IKU terbaru
9. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kerja Berbasis Kinerja
10. Finalisasi Draft Rencana Strategis tahun 2025 – 2029
11. Penetapan Rencana Strategis tahun 2025-2029
12. Finalisasi konsep pengembangan eSAKIP
13. Sosialisasi teknis pengukuran kinerja tahun 2026
14. Penyusunan laporan kinerja triwulan I
15. Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target yang ditetapkan
16. Penyampaian capaian output triwulan II 2026
17. Penyusunan revisi DIPA
18. Pemberian reward capaian tahun 2025
19. Evaluasi program kerja dan anggaran triwulan I
20. Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Triwulan I
21. Penyiapan dokumen penilaian Zona Integritas
22. Melaksanakan penilaian Zona Integritas
23. Pelaksanaan Program Zona Integritas Triwulan II
24. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi & Persepsi Kualitas Pelayanan LKE ZI LLDIKTI Wilayah XI TW II

Progress/Kegiatan

Akuntabilitas Kinerja :

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi angka capaian untuk IKU Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas secara administratif tercatat 0 dengan persentase capaian 0%. Hal ini disebabkan oleh Nilai/Predikat SAKIP resmi tahun berjalan yang belum diterbitkan oleh kementerian pembina. Namun demikian, secara substansi implementasi seluruh rencana aksi Triwulan II telah dilaksanakan secara menyeluruh. Tim SAKIP berhasil menuntaskan penyelarasan target rencana strategis dengan IKU terbaru

sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025, yang ditindaklanjuti dengan penetapan target Perjanjian Kinerja (PK), finalisasi Program Kerja, serta penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026. Sebagai langkah perencanaan jangka menengah, Tim telah merampungkan finalisasi draft hingga penetapan Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah XI Periode 2025–2029. Untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya, penyusunan pagu angka kasar, rencana kerja, dan anggaran pagu indikatif tahun 2027 juga telah diselesaikan. Peningkatan kapasitas dan pemahaman internal dilaksanakan melalui kegiatan penyamaan persepsi IKU terbaru, pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kerja Berbasis Kinerja, serta sosialisasi teknis pengukuran kinerja tahun 2026. Selain itu, konsep pengembangan aplikasi eSAKIP telah masuk tahap finalisasi konsep. Dari sisi pelaporan dan evaluasi berkala, Laporan Kinerja TW I serta evaluasi program kerja dan anggaran TW I telah dirampungkan. Pengelolaan keuangan berjalan optimal dengan penyerapan anggaran yang proporsional, penyusunan revisi DIPA, penyampaian capaian output TW II 2026, serta persiapan dokumen untuk pemberian reward atas capaian kinerja tahun sebelumnya.

Zona Integritas :

Pelaksanaan program kerja dan progres pembangunan zona integritas pada triwulan II sudah memasuki tahap penilaian dari Tim Penilai Nasional (KemenPAN RB) dan telah lulus tahapan Seleksi Administrasi. Tahapan penilaian selanjutnya adalah Analisis Dokumen dilanjutkan dengan wawancara dan tahap terakhir adalah Observasi Lapangan oleh Tim Penilai Nasional (KemenPAN RB). Sepanjang Triwulan II, Tim ZI fokus melaksanakan agenda transisi pasca-evaluasi internal meliputi Evaluasi Pelaksanaan ZI TW I, penyiapan dokumen penilaian ZI, melaksanakan penilaian mandiri ZI, serta mengeksekusi Program Kerja ZI TW II secara konsisten. Sebagai pemenuhan indikator hasil pada LKE, Tim ZI juga telah sukses melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) & Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) untuk periode Triwulan II dengan hasil yang baik.

Kendala/Permasalahan

Akuntabilitas Kinerja :

1. Belum Adanya Penetapan Resmi: Sama seperti periode sebelumnya, nilai atau predikat SAKIP definitif tahun berjalan belum diterbitkan oleh Kemendiktisaintek pada Triwulan II, sehingga input capaian angka riil pada sistem monitoring masih bersifat administratif.
2. Proses Transisi Data & Sistem pada Aplikasi eSAKIP: Adanya penyesuaian formula perhitungan IKU baru berdasarkan Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 memerlukan waktu tambahan dalam restrukturisasi data pendukung dan integrasi sistem digitalisasi eSAKIP agar benar-benar selaras.
3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Makro : Draft Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah XI Periode 2025–2029 masih dalam tahap finalisasi dan harmonisasi dengan arah kebijakan pusat, sehingga beberapa turunan rencana aksi kerja tahunan harus terus disesuaikan secara dinamis.

Zona Integritas :

1. Tingginya Kebutuhan Kesiapan Menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN): Setelah dinyatakan lolos penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dan melaju ke tahap seleksi MenPAN-RB, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dalam mempersiapkan kedalaman pemahaman seluruh agen perubahan serta staf terhadap implementasi nyata 6 area perubahan demi menghadapi evaluasi/wawancara mendalam dari pihak eksternal (MenPAN-RB).
2. Konsistensi Kualitas Pelayanan Publik di Masa Transisi Seleksi: Menjaga stabilitas indeks persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan agar tetap di atas standar minimal di tengah persiapan administratif seleksi MenPAN-RB yang cukup menyita sumber daya tim.

Strategi/Tindak Lanjut

Akuntabilitas Kinerja :

1. Akselerasi Implementasi Rencana Aksi: Tim SAKIP secara konsisten melaksanakan monitoring berkala

terhadap rencana aksi Triwulan II, memastikan pemenuhan seluruh dokumen pendukung (data fasilitas perguruan tinggi swasta) dikumpulkan tepat waktu sesuai format IKU baru.

2. Finalisasi & Uji Coba eSAKIP Baru: Melanjutkan pengembangan sistem aplikasi eSAKIP dengan menanamkan formula perhitungan baru sesuai regulasi terbaru, guna menjamin validitas pelaporan kinerja internal.
3. Harmonisasi Final Draft Renstra: Mendorong percepatan review akhir draft Rencana Strategis 2025–2029 melalui koordinasi intensif dengan biro perencanaan pusat agar dapat segera ditetapkan menjadi dokumen acuan kerja yang legal dan kokoh.

Zona Integritas :

1. Persiapan Evaluasi Seleksi MenPAN-RB (Desk Evaluation & Wawancara): Menindaklanjuti keberhasilan lolos TPI, Tim ZI segera menyusun strategi kesiapan menghadapi seleksi MenPAN-RB dengan mengadakan *simulasi/mock-up interview* bagi setiap koordinator area perubahan dan agen perubahan.
2. Penguatan Bukti Dukung (*Evidence*) Pembangunan ZI: Melakukan penataan ulang, digitalisasi, dan pemutakhiran berkas *evidence* pada lembar kerja evaluasi (LKE) agar mudah diakses dan diverifikasi oleh Tim Penilai Nasional dari KemenPAN-RB.
3. Peningkatan Kualitas Layanan & Publikasi Maklumat Pemangku Kepentingan: Melaksanakan evaluasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan II secara berkala serta menggencarkan kampanye publik terkait keterbukaan informasi dan anti-gratifikasi guna memperkuat profil LLDIKTI Wilayah XI di mata tim penilai pusat.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Fasilitas peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Melaksanakan pendampingan SPMI berdasarkan usulan Perguruan Tinggi
2. Melaksanakan Move data mahasiswa baru dan data dosen pengampu, serta data lulusan perguruan tinggi pada PTS di Kalimantan Selatan dan Tengah
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta pada PTS di Kalimantan Timur dan Tengah
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi se Kalimantan
5. Penyampaian bahan penyusunan laporan kinerja triwulan I

Progress/Kegiatan

Indikator ini mengukur sejauh mana keberhasilan fasilitasi LLDIKTI Wilayah XI dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya pembelajaran dan SPMI pada PTS di Kalimantan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan II, sebanyak 131 PTS dari total 154 PTS telah mendapatkan fasilitasi oleh LLDIKTI sesuai dengan kriteria pada Kepmendikristek nomor 358 tahun 2025 dengan capaian sebesar 85,06%. Capaian ini sudah jauh melebihi dari target rencana aksi pada triwulan II sebesar 25% dengan tingkat keberhasilan 340,26%.

Pada triwulan II beberapa program yang sudah dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian indikator ini sebagai berikut :

1. Telah melaksanakan proses fasilitasi pendampingan SPMI berdasarkan usulan Perguruan Tinggi yang masuk pada aplikasi pinandu sebanyak 5 (lima) usulan yang terdiri dari 3 (tiga) usulan pendalaman SPMI dan 2 (dua) usulan pendampingan akreditasi prodi yakni; STIE Nasional Samarinda (SPMI), Politeknik Nusantara Balikpapan (SPMI), Universitas OSO (SPMI), Politeknik Borneo Citra Medika (APS), dan Politeknik Alkon Balikpapan (APS). Yang dilaksanakan secara daring maupun luring, adapun hasil yang dicapai untuk fasilitasi pendampingan spmi tersebut yakni berupa pemahaman secara mendalam perihal teknis implementasi dan review pelaporan siklus SPMI yang disampaikan faswil

melalui hasil akhir pendampingan, beserta komitmen kepatuhan untuk pelaporan dokumen SPMI, sedangkan untuk pendampingan akreditasi prodi, PTS mendapatkan pendampingan perbaikan borang LED dan LKPS sebelum submit pada Ban Pt/Lam terkait, untuk meminimalisasi potensi revisi, agar proses reakreditasi berjalan tepat waktu, secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar.

2. Telah mengikuti “Persamaan persepsi terkait proses verifikasi pelaporan pada aplikasi SPMI bagi PTN, PTNBH, dan PTKL” secara daring terkait tugas tambahan LLDIKTI Wilayah XI untuk menanggapi proses verifikasi dokumen SPMI bagi seluruh perguruan tinggi semua kementerian di Republik Indonesia. Kegiatan masih berupa sharing pendapat, dan kendala terkait pelaksanaan potensi tugas tersebut.
3. Telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perangkat dokumen SPMI sesuai dengan Permendikdisaintek nomor 39 Tahun 2025 bagi perguruan tinggi di wilayah XI baik PTS maupun PTN, yang dilaksanakan secara daring secara tatap muka dengan durasi 2 (dua) hari pada tanggal 17 s/d 18 Juni 2026, pelaksanaan bimtek disetting kelas paralel pada hari kedua, agar perguruan tinggi dapat memahami betul perbagian siklus penting pada pelaporan SPMI. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 228 peserta dihari pertama, dan 267 peserta dihari kedua dan memfasilitasi 130 PTS LLDIKTI Wilayah XI, secara keseluruhan acara berjalan dengan lancar dengan antusias peserta yang tinggi, karena diakhir bimtek terpilih 3 (tiga) peserta terbaik yang mendapatkan sertifikat penghargaan.
4. Mengumpulkan permintaan data terkait fasilitator wilayah SPMI LLDIKTI XI yang aktif ke Belmawa berdasarkan surat nomor 1456/DST/B2/DT.02.04/2026, dan memperbaharui data lengkap tim faswil untuk kebutuhan koordinasi dan pemetaan faswil Belmawa Kemendikdisaintek
5. Mengikuti kegiatan “Penguatan Praktik Baik Penyusunan Laporan SPMI pada Tingkat LLDIKTI” secara daring dikarenakan tanggal pelaksanaan bersamaan dengan kegiatan bimtek SPMI yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah XI, koordinasi perihal teknis dan kendala serta persamaan persepsi perihal pelaporan dokumen SPMI PT

Kendala/Permasalahan

1. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mengusulkan fasilitasi Pendampingan SPMI memiliki tingkat kesiapan yang sangat beragam, pergantian tim penjaminan mutu PTS yang seringkali tanpa melalui proses serah terima dokumen, sehingga membuat PTS harus mempelajari lagi tahap penguatan dasar implementasi siklus PPEPP, sementara untuk fasilitasi pendampingan akreditasi prodi (APS) masih adanya kelemahan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) pada PTS yang didampingi, yang jika tidak dikoreksi sejak awal berpotensi memicu revisi dari BAN-PT/LAM dan menghambat ketepatan waktu proses reakreditasi, serta tantangan konsistensi pasca pendampingan: Adanya risiko penurunan komitmen kepatuhan dalam pelaporan dokumen dan review siklus SPMI secara berkala oleh PTS setelah masa pendampingan bersama Fasilitator Wilayah (Faswil) selesai dilaksanakan.
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perangkat dokumen SPMI sesuai dengan Permendikdisaintek nomor 39 Tahun 2025 bagi perguruan tinggi di wilayah XI dengan durasi 2 (dua) hari dinilai masih sangat padat untuk mengupas tuntas detail teknis per bagian siklus penting SPMI, kendala jaringan internet membuat gangguan yang cukup berarti saat pelaksanaan kegiatan secara daring.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan prapersiapan sebelum PTS yang bersangkutan mengajukan usulan pelayanan pada pinandu, dengan memastikan kesiapan syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan sebelum proses usulan oleh PTS pada aplikasi pinandu agar efisien dalam proses pendampingan, dan mengkoordinasikan setiap pembaruan dokumen kepada faswil yang akan memberikan pendampingan. Akan melakukan follow up pencapaian atas hasil pendampingan yakni pengecekan pada laman SPMI dan status akreditasi pada BAN-PT.
2. Penyediaan repository materi dan rekaman kelas paralel secara lengkap agar bisa kembali diakses peserta bimbingan teknis penyusunan perangkat dokumen SPMI sesuai dengan Permendikdisaintek nomor 39 Tahun 2025 bagi perguruan tinggi di wilayah XI dengan: Menyediakan akses digital terpusat bagi seluruh PTS/PTN di Wilayah XI untuk mengunduh materi regulasi terbaru, template perangkat dokumen SPMI standar, serta rekaman lengkap zoom meeting dari hari pertama s.d video kelas paralel hari kedua sebagai bahan rujukan mandiri yang berkelanjutan, sebagai bekal

pemahaman implementasi pelaporan dokumen sesuai dengan peraturan terbaru dan diharapkan memberikan tingkat validasi yang lebih tinggi untuk dokumen spmi yang akan diverifikasi tahun 2026 mendatang.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Anti Korupsi & Whistleblowing System Kampus
2. Sosialisasi instrumen pengumpulan data kinerja kepada perguruan tinggi swasta (PTS)
3. Pendampingan implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) pada perguruan tinggi
4. Verifikasi data kinerja triwulan I
5. Penyampaian bahan penyusunan laporan kinerja triwulan I

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja [IKU 2.2] Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi belum dapat direalisasikan sehingga persentase capaian masih 0%. Hal ini disebabkan karena pengumpulan data capaian dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum dilaksanakan, sehingga belum tersedia data yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran indikator. Selain itu, hingga akhir Triwulan II masih dilakukan penyelarasan terhadap kriteria pengukuran indikator yang menjadi acuan dalam penilaian capaian kinerja.

Meskipun demikian, LLDIKTI Wilayah XI melalui Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan tetap melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, fasilitasi, dan penguatan implementasi kebijakan yang mendukung pencapaian IKU 2.2, antara lain:

1. Menerbitkan surat imbauan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang belum membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) agar segera menyelesaikan proses pembentukan dan registrasi melalui aplikasi Sahabat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Perguruan Tinggi Swasta di wilayah LLDIKTI Wilayah XI sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan PPKPT.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Kebijakan Anti Korupsi dan Whistleblowing System pada Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI pada tanggal 24 Juni 2026 di Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen perguruan tinggi dalam membangun budaya integritas.
4. Menyelenggarakan Pendampingan Teknis Penetapan dan Registrasi Satgas PPKPT di Aplikasi Sahabat Tahun 2026 melalui media Zoom Meeting pada tanggal 11 Juni 2026 guna mempercepat pembentukan dan registrasi Satgas PPKPT pada Perguruan Tinggi Swasta.
5. Melaksanakan verifikasi data kinerja Triwulan I serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Pelaksanaan kegiatan tersebut untuk memperkuat tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, membangun budaya antikorupsi, serta meningkatkan kepatuhan Perguruan Tinggi Swasta terhadap ketentuan yang berlaku. Namun demikian, hasil kegiatan tersebut belum dapat dikonversi menjadi capaian indikator karena pengukuran masih menunggu pelaksanaan pengumpulan data sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan program pada Triwulan II, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi percepatan pencapaian indikator kinerja, yaitu:

1. **Kendala teknis pada aplikasi Sahabat.** Aplikasi Sahabat yang dikembangkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan masih mengalami pemeliharaan (maintenance) secara berkala serta kendala teknis, antara lain kegagalan sinkronisasi data dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Kondisi ini menghambat proses registrasi, pembaruan data, dan penetapan Satgas PPKPT pada Perguruan Tinggi.
2. **Komitmen** sebagian Perguruan Tinggi Swasta dalam pembentukan Satgas PPKPT masih perlu ditingkatkan. Pada beberapa perguruan tinggi, pembentukan Satgas PPKPT belum menjadi prioritas sehingga proses pembentukan dan registrasi belum dapat diselesaikan sesuai target.
3. **Tingginya pergantian operator PDDIKTI di Perguruan Tinggi Swasta.** Pergantian operator menyebabkan kendala dalam proses registrasi akun aplikasi Sahabat karena akun PDDIKTI Master yang digunakan untuk mengakses dan mendaftarkan akun pada aplikasi Sahabat sering kali tidak dapat digunakan oleh operator baru akibat informasi username dan kata sandi tidak terdokumentasi atau tidak diserahkan kepada pengelola berikutnya.
4. Masih terdapat **perbedaan pemahaman** terhadap implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Sebagian Perguruan Tinggi Swasta masih memerlukan pendampingan terkait kewajiban pembentukan Satgas PPKPT, mekanisme penetapan, struktur organisasi, tugas dan fungsi Satgas, serta proses registrasi melalui aplikasi Sahabat.
5. **Pengumpulan data capaian indikator belum dilaksanakan.** Sampai dengan akhir Triwulan II, pengumpulan data kepada Perguruan Tinggi Swasta belum dilaksanakan sehingga belum tersedia data yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran capaian IKU 2.2.

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai upaya percepatan pencapaian indikator pada triwulan berikutnya, LLDIKTI Wilayah XI akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data capaian dari Perguruan Tinggi Swasta sesuai mekanisme dan kriteria pengukuran yang ditetapkan oleh kementerian.
2. Melanjutkan pendampingan pembentukan dan registrasi Satgas PPKPT bagi Perguruan Tinggi Swasta yang belum menyelesaikan proses melalui aplikasi Sahabat.
3. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi mengenai implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, termasuk penguatan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan tata kelola Satgas PPKPT.
4. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait penyelesaian kendala teknis pada aplikasi Sahabat, termasuk sinkronisasi data dengan PDDIKTI.
5. Mendorong Perguruan Tinggi Swasta untuk meningkatkan komitmen dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta penguatan budaya antikorupsi melalui kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembentukan Satgas PPKPT serta pelaksanaan kebijakan di Perguruan Tinggi Swasta sebagai dasar penyusunan laporan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Melaksanakan kegiatan Penjurian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
2. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Singkat Mahasiswa Berprestasi
3. Pendampingan pengembangan kemahasiswaan dan prestasi pada perguruan tinggi
4. Monitoring dan Evaluasi KIP Kuliah
5. Verifikasi data kinerja triwulan I

6. Penyampaian bahan penyusunan laporan kinerja triwulan I

Progress/Kegiatan

Pada triwulan II Tahun 2026, LLDIKTI Wilayah XI telah berhasil memfasilitasi sebanyak 87 PTS dalam program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan dan prestasi dengan capaian sebesar 56,49%. Capaian ini sudah memenuhi target dari rencana aksi triwulan II sebesar 10%. Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan telah berhasil merealisasikan tahapan krusial dalam program Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Tahun 2026 Tingkat Wilayah, yaitu Pelaksanaan Penjurian Tahap Wilayah. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program kerja Triwulan I setelah menyelesaikan tahapan sosialisasi program ke seluruh Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI, pembukaan pendaftaran, hingga penginformasian serta persiapan awal pelaksanaan *Desk Evaluation*. Untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan lainnya juga telah dilaksanakan Bimtek Implementasi Kebijakan Anti Korupsi & Whistleblowing System Kampus di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat satuan tugas PPKPT pada setiap kampus. Keseluruhan rencana aksi sudah dilakukan kecuali pelaksanaan kegiatan Pelatihan Singkat Mahasiswa Berprestasi dan monitoring KIP kuliah kegiatannya yang mundur ke triwulan berikutnya.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan dalam Triwulan II meliputi:

1. Penjaringan Dokumen Final: Mengakomodasi dan memverifikasi berkas-berkas pendaftaran mahasiswa dari PTS yang lolos ke tahap penilaian wilayah.
2. Pelaksanaan Penjurian: Menyelenggarakan proses penjurian yang komprehensif (meliputi penilaian Capaian Unggulan/CU, Gagasan Kreatif/Produk Inovatif, serta kemampuan Bahasa Inggris) dengan melibatkan tim juri pakar yang kompeten dan independen. Kegiatan Pelaksanaan Penjurian dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu :
3. Melaksanakan rapat bersama para juri melalui media zoom meeting pada kegiatan Rapat penyamaan persepsi penilaian Pilmapres yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026.
4. Juri melakukan penilaian Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahap wilayah XI sesuai SK Nomor NOMOR: 23/LL11/KP/2026. Penjurian dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 24 April 2026.
5. Penetapan Pemenang Wilayah: Merumuskan hasil penilaian akhir untuk menentukan perwakilan Mahasiswa Berprestasi dari LLDIKTI Wilayah XI yang berhak melaju ke tingkat awal nasional sesuai hasil pada Kegiatan rapat penetapan Pilmapres Tingkat Wilayah XI yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026. Hasil dari rapat tersebut adalah Berita Acara Peserta yang lolos seleksi Tingkat Wilayah perwakilan LLDIKTI 11. BA dikirimkan ke *Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisainstek*.
6. Melaksanakan Bimtek Implementasi Kebijakan Anti Korupsi & Whistleblowing System Kampus di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI pada tanggal 24 Juni 2026 secara Hybrid.

Kendala/Permasalahan

1. Sempitnya rentang waktu (*deadline*) persiapan dan pendaftaran dari pusat menyebabkan minimnya PTS di wilayah XI yang mengirimkan delegasi mahasiswanya. Akibatnya, jumlah keterwakilan peserta pada seleksi tahap wilayah ini menjadi sangat terbatas.
2. Banyak berkas persyaratan yang dikirimkan oleh PTS tidak sesuai dengan buku panduan resmi (khususnya bukti dokumen Capaian Unggulan/CU). Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman PTS terhadap detail isi panduan teknis yang ada sehingga Tim akademik melakukan verifikasi intensif (*followup*) kepada peserta untuk memastikan seluruh dokumen perbaikan memenuhi standar sebelum proses penjurian.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Guna mengantisipasi sempitnya rentang waktu (*deadline*) dari pusat, LLDIKTI Wilayah XI akan mengambil langkah proaktif dengan menginformasikan rencana kegiatan dan persyaratan awal kepada PTS jauh sebelum panduan resmi dirilis, dengan mengacu pada linimasa serta jadwal pelaksanaan di tahun sebelumnya. Langkah ini akan dibarengi dengan sosialisasi intensif sejak dini mengenai tata cara penyusunan dokumen Capaian Unggulan (CU) serta penyediaan layanan

konsultasi (*helpdesk*) pra-verifikasi, sehingga PTS memiliki waktu persiapan yang lebih longgar dan tim kerja dapat meminimalkan kesalahan berkas secara lebih efektif sebelum proses penjurian dimulai.

2. Pemanfaatan aplikasi Pilmapres yang dikembangkan melalui pendampingan mahasiswa magang pada tim kerja Akademik dan Kemahasiswaan diharapkan nantinya dapat mengoptimalkan proses seleksi awal serta meningkatkan akurasi pemenuhan persyaratan dokumen secara signifikan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Percepatan Jabatan Akademik Lektor Kepala Dan Guru Besar Melalui Penguatan Publikasi Jurnal Bereputasi
2. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Ke Lektor Melalui Singkron Versi 3
3. Melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan SKP Dan Perhitungan Angka Kredit Penelitian Bagi Dosen Tetap Yayasan
4. Pelaksanaan penilaian angka kredit dosen
5. Pendampingan layanan jabatan fungsional dosen
6. Evaluasi sistem layanan penilaian angka kredit dosen (Singkron)
7. Verifikasi data kinerja triwulan I
8. Penyampaian bahan penyusunan laporan kinerja triwulan I

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mendukung peningkatan jabatan fungsional dosen di lingkungan perguruan tinggi swasta. Kegiatan tersebut meliputi Bimbingan Teknis Percepatan Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar melalui Penguatan Publikasi Jurnal Bereputasi, Bimbingan Teknis Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli ke Lektor melalui aplikasi SINGKRON Versi 3, serta Workshop Penyusunan SKP dan Perhitungan Angka Kredit Penelitian bagi Dosen Tetap Yayasan. Selain itu, layanan penilaian angka kredit dosen, pendampingan usulan jabatan fungsional, evaluasi sistem layanan SINGKRON, verifikasi data kinerja Triwulan I, dan penyampaian bahan penyusunan laporan kinerja Triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi.

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan jabatan akademik dosen, LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan pendampingan terhadap usulan Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar melalui aplikasi SISTER. Pendampingan dilaksanakan secara berkelanjutan kepada perguruan tinggi dan dosen, mencakup pemenuhan persyaratan, verifikasi kelengkapan dokumen, penelaahan substansi usulan, serta fasilitasi penyelesaian kendala teknis selama proses pengusulan. Selain itu, dilakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan perguruan tinggi guna memastikan setiap usulan telah memenuhi persyaratan administratif dan substansi sesuai ketentuan yang berlaku sebelum diproses pada tahapan penilaian. Melalui pendampingan tersebut, kualitas usulan diharapkan semakin baik sehingga proses penilaian dan penetapan jabatan akademik dapat berjalan secara lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun kegiatan pembinaan dan pendampingan telah terlaksana, realisasi indikator pada Triwulan II masih sebesar 0 dosen atau 0% dari target Triwulan II. Hal ini disebabkan proses kenaikan jabatan fungsional memerlukan tahapan yang cukup panjang, mulai dari pemenuhan persyaratan, penyusunan dan verifikasi dokumen, penilaian angka kredit, hingga penerbitan keputusan jabatan akademik. Di samping itu, proses penyelesaian usulan turut dipengaruhi oleh penyesuaian layanan pada aplikasi SINGKRON, termasuk adanya kendala server dan implementasi penambahan fitur sistem yang memerlukan proses penyesuaian. Kondisi tersebut berdampak pada waktu penyelesaian sebagian usulan jabatan akademik. Dengan terselesaikannya proses penyesuaian sistem dan optimalnya pelaksanaan layanan, hasil pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan jabatan fungsional dosen pada triwulan berikutnya.

Kendala/Permasalahan

1. Proses kenaikan jabatan akademik dosen memerlukan tahapan administrasi dan penilaian yang berjenjang sehingga realisasi peningkatan jabatan belum dapat dicapai dalam periode Triwulan II.
2. Masih terdapat usulan jabatan akademik yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun substansi sehingga memerlukan perbaikan dan pendampingan lanjutan oleh perguruan tinggi dan dosen pengusul.
3. Proses penyelesaian sebagian usulan mengalami keterlambatan akibat penyesuaian layanan pada aplikasi SINGKRON, termasuk kendala server dan implementasi penambahan fitur sistem yang berdampak pada proses pengajuan dan verifikasi usulan.
4. Masih terdapat perguruan tinggi yang memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam pemanfaatan aplikasi SINGKRON dan SISTER, serta dalam memahami ketentuan terbaru terkait pengusulan jabatan akademik.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melanjutkan pendampingan kepada perguruan tinggi dan dosen dalam penyusunan serta penyempurnaan usulan jabatan akademik agar memenuhi persyaratan administrasi dan substansi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan layanan pendampingan dan konsultasi teknis melalui aplikasi SINGKRON dan SISTER guna mempercepat proses pengusulan dan penyelesaian usulan jabatan akademik.
3. Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan pengelola aplikasi dan unit terkait untuk memastikan proses pengusulan melalui SINGKRON dan SISTER dapat berjalan lebih optimal setelah penyesuaian sistem.
4. Mendorong perguruan tinggi untuk segera melengkapi dokumen dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap usulan jabatan akademik sehingga proses penilaian dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Melanjutkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pada Triwulan III sebagai upaya meningkatkan jumlah dosen PTS yang memperoleh kenaikan jabatan akademik sesuai target kinerja tahun 2026.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi
2. Pendampingan layanan Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS
3. Verifikasi data kinerja triwulan I
4. Penyampaian bahan penyusunan laporan kinerja triwulan I
5. Persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian SINTA
6. Persiapan kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Capaian Kerjasama Perguruan Tinggi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, realisasi fisik capaian IKU 3.3 secara kuantitatif masih tercatat 0% karena pelaksanaan program fasilitasi langsung ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dijadwalkan pada triwulan berikutnya. Fokus kerja Tim pada Triwulan II diarahkan pada persiapan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kepada PTS agar sesuai dengan kriteria pada Kepmendiktisaintek nomor 358 tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Dalam persiapan pelaksanaan program, tim mengidentifikasi beberapa kendala teknis dan administratif sebagai berikut:

1. Masih terdapat ambiguitas dan multitafsir pada petunjuk teknis formulasi pengukuran capaian IKU 3.3, sehingga memerlukan waktu koordinasi tambahan untuk menyamakan persepsi pengukuran

agar pelaporan akhir tetap akurat dan akuntabel.

2. Adanya penetapan syarat tambahan yang cukup ketat terkait kualifikasi dan kriteria peserta PTS yang dapat diakui ke dalam capaian IKU, sehingga tim harus melakukan kurasi dan verifikasi data profil peserta secara lebih selektif dan mendalam sebelum kegiatan dimulai.

Strategi/Tindak Lanjut

Guna mengatasi kendala tersebut dan memastikan target tahunan tetap tercapai secara optimal, langkah strategis yang akan dilaksanakan adalah:

1. Melakukan koordinasi aktif dan konsultasi dengan unit kerja pembina di tingkat pusat/kementerian untuk memperjelas formula pengukuran dan menyepakati parameter keberhasilan IKU 3.3.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data profil dosen/PTS di wilayah kerja LLDIKTI XI secara berkala guna menyaring calon peserta yang benar-benar memenuhi kriteria pengakuan kinerja.
3. Mematangkan persiapan teknis pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian SINTA yang dijadwalkan pada Triwulan III agar dapat menjaring partisipasi peserta yang eligible secara maksimal dan efektif.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan kebutuhan riil belanja pegawai tahun 2026
2. Penyusunan dokumen permintaan kekurangan belanja pegawai tahun 2026
3. Penyusunan kebutuhan riil anggaran triwulan II
4. Penyusunan rencana penarikan anggaran triwulan II
5. Monitoring dan evaluasi anggaran triwulan II
6. Koordinasi tim pengelola keuangan dengan perencanaan
7. Asesment internal capaian kinerja anggaran triwulan II
8. Penyampaian realisasi capaian output triwulan II
9. Pengawasan proses pelaksanaan rencana belanja kontraktual triwulan II
10. Penyiapan bahan revisi internal (POK)
11. Penyampaian bahan penyusunan laporan kinerja triwulan I
12. Percepatan pelaksanaan kegiatan
13. Melakukan Rekonsiliasi Keuangan

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi capaian kumulatif IKU 4.1 tercatat sebesar 63,62 dari target Triwulan II sebesar 50, atau mencapai tingkat keberhasilan sebesar 127,24% dari target Triwulan II. Secara umum, performa pelaksanaan anggaran mengalami tren positif yang berkelanjutan dari triwulan sebelumnya. Komponen utama penilaian kinerja anggaran ini ditopang oleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berhasil ditingkatkan menjadi 99,67 (naik dari 99,5 pada TW I). Selain itu, nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART/Monev yang pada triwulan lalu tercatat 0, saat ini sudah mulai ter-update dan menunjukkan pergerakan angka di skor 30,68.

Selama periode Triwulan II, Tim Keuangan telah berhasil mengeksekusi seluruh 13 rencana aksi yang ditetapkan, antara lain:

- **Aspek Manajemen Belanja Pegawai & Perencanaan Anggaran:** Menyusun kebutuhan riil belanja pegawai tahun 2026 serta menyusun dokumen permintaan kekurangan belanja pegawai tahun 2026. Tim juga telah merumuskan kebutuhan riil anggaran serta Rencana Penarikan Anggaran (RPD) khusus untuk Triwulan II.
- **Aspek Monitoring, Akuntabilitas & Akselerasi:** Mengintensifkan monitoring dan evaluasi anggaran Triwulan II, melakukan koordinasi rutin antara tim pengelola keuangan dengan tim

perencanaan, serta melaksanakan *assessment* internal capaian kinerja anggaran Triwulan II. Tim Keuangan juga telah menyampaikan realisasi capaian output Triwulan II serta menyampaikan bahan penyusunan laporan kinerja Triwulan I.

- **Aspek Operasional Keuangan:** Mengawal ketat pengawasan proses pelaksanaan rencana belanja kontraktual Triwulan II, menyiapkan bahan revisi internal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di berbagai lini, serta menuntaskan Rekonsiliasi Keuangan secara periodik.

Kendala/Permasalahan

Meskipun persentase capaian target kumulatif Triwulan II dinilai sangat baik (127,24%), terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang membuat nilai capaian akhir belum sempurna 100%, yaitu:

- **Belum Optimalnya Komponen Nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran):** Nilai EKA pada aplikasi SMART/Monev baru tercatat sebesar 30,68. Hal ini disebabkan karena proses sinkronisasi data realisasi secara nasional di tingkat kementerian masih berjalan bertahap, serta beberapa capaian *output* volume rincian output (RO) pada satker belum sepenuhnya tervalidasi 100% oleh sistem pusat pada akhir bulan Juni.
- **Kendala Administratif Belanja Pegawai:** Adanya pergeseran atau kekurangan alokasi belanja pegawai di tahun berjalan memerlukan proses penyusunan dokumen usulan kekurangan yang cukup birokratis, sehingga sedikit memengaruhi ritme pencairan anggaran belanja pegawai yang riil.
- **Realisasi belanja barang belum mencapai target :** Realisasi belanja barang belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 50%. Hal ini salah satunya akibat dari efisiensi anggaran sehingga beberapa pos yang anggarannya sudah tersedia belum dilaksanakan karena terbentur dengan aturan efisiensi anggaran seperti pemeliharaan gedung perkantoran.

Strategi/Tindak Lanjut

Guna menjaga konsistensi performa anggaran dan menyelesaikan kendala di atas, Tim Keuangan mengagendakan beberapa langkah strategis pada triwulan berikutnya:

- **Akselerasi Pemutakhiran Data EKA:** Melakukan koordinasi aktif dan berkala dengan Tim Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pusat untuk memastikan seluruh data realisasi *output* yang telah disampaikan pada TW II dapat tersinkronisasi sempurna guna mendongkrak nilai EKA pada aplikasi Monev Kemenkeu.
- **Pengawasan Usulan Kekurangan Belanja Pegawai:** Mengawal secara intensif dokumen permintaan kekurangan belanja pegawai tahun 2026 yang telah disusun ke tingkat pusat agar persetujuan anggaran revisi dapat segera turun dan diserap tepat waktu.
- **Penajaman anggaran pada triwulan III:** Memanfaatkan hasil rekonsiliasi keuangan dan *assessment* internal TW II sebagai basis untuk menyusun proyeksi RPD TW III yang lebih presisi, serta meningkatkan pengawasan proses pelaksanaan rencana belanja kontraktual maupun non kontraktual agar tidak terjadi deviasi yang dapat memengaruhi nilai IKPA.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	130	130	Rp4.937.739.000	Rp2.339.530.593	47.38
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1850	1955	Rp69.584.684.000	Rp69.580.886.700	99.99
3	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp489.586.000	Rp321.590.001	65.69
4	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp76.722.324.000	Rp74.993.495.315	97.75
Total Anggaran					Rp151.734.333.000	Rp147.235.502.609	97.04

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Secara garis besar hasil capaian kinerja sudah cukup baik meskipun pada beberapa indikator capaian masih 0 bukan merupakan tanda LLDIKTI Wilayah XI tidak ada upaya namun lebih banyak dalam proses persiapan untuk mematangkan agar setiap indikator diukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tim kerja agar selalu menjaga kekompakan dan kerjasama antar bagian untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal pada periode berikutnya.
2. Inovasi layanan yang sudah ada agar selalu dievaluasi berdasarkan dengan kebutuhan pengguna yang saat ini ekspektasinya semakin tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI.
3. Sehubungan dengan keberhasilan usulan Zona Integritas LLDIKTI Wilayah XI yang lolos dalam penilaian TPI, Tim ZI segera menyusun strategi kesiapan menghadapi seleksi MenPAN-RB dan memperkuat bukti dokumen pendukung pembangunan ZI agar mudah diakses dan diverifikasi oleh Tim Penilai Nasional dari KemenPAN-RB.
4. Aplikasi eSAKIP yang sedang dalam pengembangan agar selaras dengan IKU baru dapat difinalisasi dan diimplementasikan segera pada triwulan III untuk memastikan pengelolaan SAKIP menjadi lebih optimal.
5. Setiap tim kerja agar melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dirasa masih kurang optimal dan melakukan penyesuaian program kerja untuk mendukung pencapaian kinerja yang akan datang.



Banjarmasin, 17 Juli 2026

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XI,

Muhammad Akbar